



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 2.

- (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2021

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 


Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 61

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan atau panduan kerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021–2026 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan - permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi Kabupaten Sumbawa Barat serta misi pembangunan.

Besar harapan kami bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat melalui program-program yang telah disusun.

Taliwang, 24 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sumbawa Barat government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT" around the perimeter and "DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drs. BURHANUDDIN, M.M

NIP. 19641212 198903 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	2
1.3 Maksud dan Tujuan -----	4
1.4 Sistematika Penulisan -----	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -----	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi -----	7
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah -----	14
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah -----	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah ---	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI -----	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah -----	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi -----	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ---	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis -----	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN -----	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah -----	37
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan -----	39
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan -----	44
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan -----	57
7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika -----	57
BAB VIII PENUTUP -----	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama diberbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu pesat, mendorong berbagai kota dibelahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang pada bidang industri Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju di Era Industri 4.0

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke-4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasis berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (*M2M*) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things (IoT)* yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Pemanfaatan dan perkembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat berperan sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

1. *Government to Citizen (G2C)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki

hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

2. *Government to Business* (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Government* (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Komunikasi dan Informasi hadir untuk mewujudkan tersebut, Ada 3(Tiga) bidang urusan yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: yang meliputi bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Hal tersebut menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, peraturan perundang undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 20 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan kebijakan dan program strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Pusat dan Daerah.
2. Mewujudkan Program dan Kegiatan Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026 disusun untuk memberikan landasan Pemerintah dalam melakukan sinergi dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dimasyarakat secara responsif, sebagai upaya Pertanggungjawaban layanan publik yang profesional.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat;

1. Tercapainya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat serta menetapkan indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Tersedianya pedoman bagi seluruh Unit Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas pokok dan Fungsi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur organisasi

Sesuai dengan peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Struktur sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretaris Dinas

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
2. Memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
4. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
5. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
6. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dinas di bantu 2 (dua) Kasubbag :

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Rincian tugas kepala Subbagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja
5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya
6. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas
7. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
9. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas
10. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan

11. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
16. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian
17. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Kasubbag Perencanaan

Rincian tugas Kasubbag koordinasi Perencanaan

1. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
2. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan
3. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan
4. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas
5. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas
6. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas
7. melaksanakan pengelolaan data dan informasi
8. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kasubbag Keuangan

Rincian tugas Kasubbag Keuangan

1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai
2. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan

3. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran
4. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. Melaksakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksanagn tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika

Rincian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
2. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
3. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
4. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
5. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang komunikasi dan informatika
6. Mongkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kominfo dibantu 2 (dua) Kepala Seksi

a. Kepala Seksi Komunikasi

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi komunikasi
2. Menyusun bahan kebijakan teknis komunikasi publik
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis komunikasi publik
4. Merancang bahan kebijakan teknis komunikasi publik
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis komunikasi publik
6. Membuat konsep bahan kebijakan teknis komunikasi publik
7. Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis komunikasi publik
8. Menganalisis bahan kebijakan teknis komunikasi publik
9. Menyelenggarakan pelayanan pos di pedesaan
10. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan pemberian izin serta menertibkan jasa titipan untuk kantor agen
11. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi
12. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi iizin penyelenggara telekomunikasi khusus keperluan pemerintah dan badan hokum serta usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dalam cakupan wilayah kabupaten

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Seksi Informatika

Rincian tugas kepala seksi informatika

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi informatika
2. Menyusun bahan kebijakan teknis informatika
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis informatika
4. Merancang bahan kebijakan teknis informatika
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis informatika
6. Melaksanakan desiminasi informasi nasional
7. Melaksanakan pengelolaan website pemerintah daerah
8. Melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi pengelolaan data elektronik
9. Mengembangkan layanan monitoring isu publik di media massa/media sosial
10. Mengembangkan kegiatan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah meliputi briefing notes, press release, dan backgrounders
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Rincian tugas kepala bidang statistik dan persandian

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
2. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
3. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
4. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian
5. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang statistik dan persandian
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik dan persandian
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang statistik dan persandian dibantu 2 (dua) kepala seksi

a. Kepala Seksi Statistik

Rincian tugas kepala seksi statistik

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi statistik
2. Menyusun bahan kebijakan teknis statistik
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis statistik
4. Merancang bahan kebijakan teknis statistik
5. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik

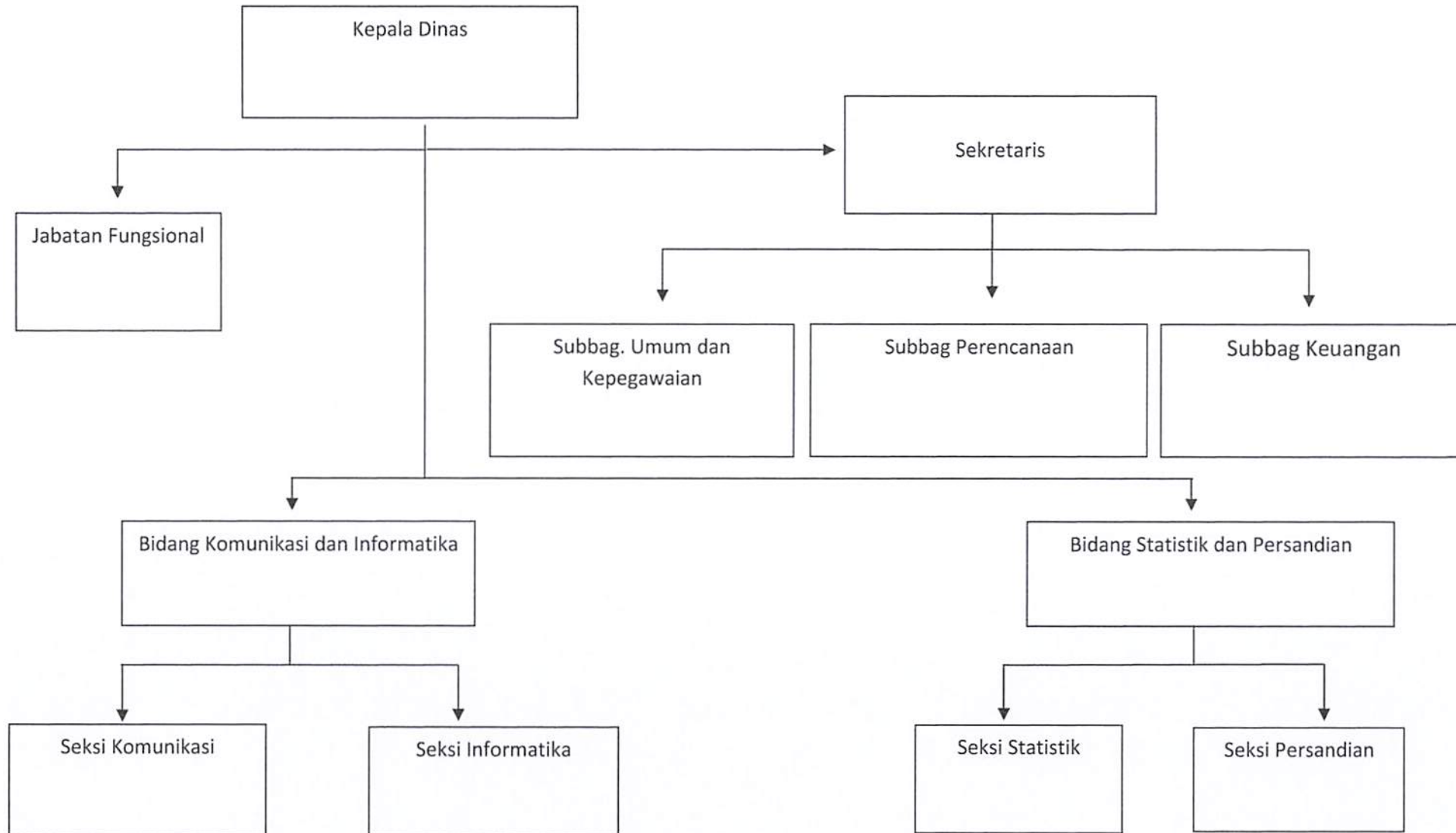
6. Melakukan penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan data elektronik
7. Menyelenggarakan komplikasi, integrasi dan penyajian data informasi
8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Seksi Persandian

Rincian tugas kepala seksi persandian

1. Menyusun program dan rencana kerja seksi persandian
2. Menyusun bahan kebijakan teknis persandian
3. Merencanakan bahan kebijakan teknis persandian
4. Merancang bahan kebijakan teknis persandian
5. Mengembangkan bahan kebijakan teknis persandian
6. Menganalisis bahan kebijakan teknis persandian
7. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pembinaan peralatan sandi, pembinaan sistem sandi, pembinaan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian
8. Melaksanakan pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan perangkat daerah lainnya
9. Melaksanakan penerapan dan pengkoordinasian pengembangan teknologi persandian
10. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan peralatan sandi, system/kunci sandi dan material sandi
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat**



2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dukungan dan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi daya upaya untuk mengatasinya secara partisipatif dengan menempatkan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika sebagai subyek pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan Pembangunan. Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pembangunan daerah merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tergambar dalam susunan kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	
1	2	3	4	5	6
1	Juru Muda, I/a	-	-	-	-
2	Juru Muda TK.I I/b	-	-	-	-
3	Juru, I/c	-	-	-	-
4	Juru Tk.I, I/c	-	-	-	-
5	Pengatur Muda II/a	-	-	-	-
6	Pengatur muda, TK.I, II/b	2	-	-	1
7	Pengatur, II/c	1	-	-	2
8	Pengatur TK.I, II/d	3	-	-	5
9	Penata muda, III/a	-	3	-	3
10	Penata Muda TK.I, III/b	2	-	-	1
11	Penata, III/c	1	-	-	1
12	Penata Tk. I, III/d	3	-	-	5
13	Pembina, IV/a	2	-	-	2
14	Pembina Tk. I, IV/b	1	-	-	1
15	Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	-	1

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	
16	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-	-
17	Pembina Utama, IV/e	-	-	-	-
	Jumlah	16	3	-	19

Sumber : Umum dan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PTT	
1	SD	-	-	1	1
2	SMP	-	-	1	1
3	SMA	5	-	8	13
4	D1	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-
6	D3	1	-	2	3
7	D4	-	-	-	-
8	S1	7	3	10	20
9	S2	3	-	-	3
	Jumlah	16	3	22	41

Sumber : Umum dan Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

Dari Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa kebutuhan Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kuantitas kurang memadai. Jumlah pegawai yang ada di dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat adalah 36 orang, dengan jumlah PNS 19 orang dan PTT 25 orang.

Tabel 2.3 Daftar Aset

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	
	Nama/ Jenis Barang			Banyak	Harga
I	2	3	4	5	6
1	Portable Generating Set	Pembelian	2017	1	24.000.000
2	Portable Generating Set	Hibah	2018	1	7.700.000
3	Station Wagon/Toyota Avanza	Pembelian	2010	1	148.000.000
4	Station Wagon/ Isuzu	Pembelian	2013	1	483.677.828
5	Sepeda Motor/ Honda WIN	Pembelian	2004	1	9.470.500
6	Sepeda Motor Suzuki	Pembelian	2006	1	9.700.000
7	Sepeda Motor Suzuki Thunder	Pembelian	2006	1	14.850.000
8	Sepeda Motor Supra	Pembelian	2008	1	12.750.000
9	Sepeda Motor Vario	Pembelian	2018	4	73.800.000
10	Global Positioning System	Pembelian	2014	1	5.000.000
11	Mesin Ketik	Pembelian	2018	1	3.000.000
12	Rak Besi/Metal	Pembelian	2016	1	23.400.000
13	Filling Besi/Metal	Hibah	2004	1	862.500
14	Filling Besi/Metal	Pembelian	2009	1	1.500.000
15	Filling Kayu	Pembelian	2011	1	2.466.564
16	Lemari Kayu	Pembelian	2018	5	20.000.000
17	Papan Visuil	Pembelian	2015	57	17.100.000
18	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	74.448.000
19	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	134.850.000
20	Papan Nama Instansi	Pembelian	2017	1	5.000.000
21	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	2.500.000
22	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	2.500.000
23	Papan Pengumuman	Pembelian	2018	1	49.500.000

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	
	Nama/ Jenis Barang			Banyak	Harga
I	2	3	4	5	6
24	Mesin Absensi	Pembelian	2017	1	3.915.140
25	Overhead Projektor/Infocus	Pembelian	2014	1	8.000.000
26	Overhead Projektor/View Sonic	Pembelian	2018	1	8.900.000
27	Overhead Projektor/Microvosion	Hibah	2018	1	15.585.500
28	Overhead Projektor/Nec M403HG	Hibah	2018	1	24.960.000
29	Rak Kayu	Pembelian	2008	1	2.975.000
30	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	2	12.000.000
31	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	7	21.000.000
32	Meja Kayu Rotan	Pembelian	2017	1	12.000.000
33	Kursi Lipat/Chitose	Pembelian	2009	6	1.800.000
34	Kursi Lipat	Pembelian	2013	5	1.625.000
35	Kursi Lipat Chitose	Pembelian	2018	50	24.500.000
36	Meja Biro	Pembelian	2009	3	4.490.001
37	Sofa/Kayu local	Pembelian	2009	1	3.000.000
38	Sofa	Pembelian	2018	2	20.000.000
39	Meublair Lainnya	Pembelian	2017	1	100.000.000
40	Mesin Potong Rumput	Pembelian	2018	1	6.000.000
41	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	10.000.000
42	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	10.000.000
43	AC Unit	Pembelian	2017	1	10.000.000
44	AC Unit	Pembelian	2017	1	10.000.000
45	AC Split	Pembelian	2009	1	3.500.000
46	AC Split	Pembelian	2016	2	10.400.000

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	
	Nama/ Jenis Barang			Banyak	Harga
I	2	3	4	5	6
47	AC Split/Jetcool	Pembelian	2017	1	5.000.000
48	Loudspeaker/Toa	Pembelian	2015	1	3.500.000
49	Loud Speaker/Proel EX-15P	Hibah	2018	4	17.600.000
50	Loudspaecker/Proel Calbe Connector	Hibah	2018	1	8.140.000
51	Sound System/Home Use	Pembelian	2018	1	14.500.000
52	Microphone/Ashley SMR-6	Hibah	2018	1	1.650.000
53	Microphone/Proel	Hibah	2018	1	1.980.000
54	Microphone Floor Stand	Hibah	2018	4	2.200.000
55	Tustel	Pembelian	2011	1	6.000.000
56	Tustel	Pembelian	2013	1	9.810.000
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2017	1	10.000.000
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2018	1	25.000.000
59	Internet	Pembelian	2018	1	1.777.947.000
60	P.C Unit/Acer	Pembelian	2014	1	9.800.000
61	P.C Unit/Asus	Pembelian	2018	2	20.000.000
62	P.C Unit/Lenovo	Pembelian	2018	1	19.800.000
63	Lap Top/Toshiba L40-AS101G Intel	Pembelian	2015	1	9.500.000
64	Laptop Toshiba	Pembelian	2015	1	8.160.000
65	Lap Top Asus	Pembelian	2016	2	50.000.000
66	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	10.000.000
67	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	10.000.000
68	Lap Top Asus	Pembelian	2017	3	53.400.000

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	
	Nama/ Jenis Barang			Banyak	Harga
I	2	3	4	5	6
69	Lap Top Asus	Pembelian	2017	1	19.900.000
70	Hard Disk	Pembelian	2016	1	4.000.000
71	Hard Disk	Pembelian	2018	2	4.000.000
72	Printer Canon	Pembelian	2018	5	20.000.000
73	Printer Epson	Pembelian	2018	1	4.500.000
74	Printer Epson LX 300	Pembelian	2018	1	4.000.000
75	Printer HP	Pembelian	2015	1	8.000.000
76	Printer Canon Pixma MP 237	Pembelian	2015	1	2.000.000
77	Printer Canon MP 237	Pembelian	2015	1	2.860.000
78	Printer LX 310	Pembelian	2015	1	3.500.000
79	Printer Canon Inkjet	Pembelian	2016	1	3.500.000
80	Printer Canon Pixma	Pembelian	2017	3	9.000.000
81	Peralatan Persomal Komputer	Pembelian	2016	1	16.900.000
82	Server HP	Pembelian	2016	1	26.000.000
83	Router	Pembelian	2014	1	1.000.000
84	Router	Pembelian	2015	10	40.000.000
85	Router	Pembelian	2016	3	2.730.000
86	Router	Pembelian	2016	3	19.500.000
87	Router	Pembelian	2016	10	6.500.000
88	Router	Pembelian	2016	1	7.800.000
89	Router	Pembelian	2016	1	23.400.000
90	Router	Pembelian	2016	1	12.350.000
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2012	2	6.000.000
92	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Pembelian	2010	1	1.500.000

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	
	Nama/ Jenis Barang			Banyak	Harga
I	2	3	4	5	6
93	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Pembelian	2010	1	1.500.000
94	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Pembelian	2007	6	7.479.000
95	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Pembelian	2009	6	9.360.000
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Pembelian	2013	1	2.500.000
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/frontline	Pembelian	2017	1	4.000.000
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/Olympic	Pembelian	2006	1	1.250.000
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	2	6.000.000
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV/Olympic	Pembelian	2006	3	3.450.000
101	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2015	1	2.000.000
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	7	14.000.000
103	Lemari Arsip untuk arsip	Pembelian	2015	1	2.000.000
104	Camera + Attachment	Pembelian	2018	1	17.500.000
105	Camera + Attachment	Pembelian	2018	1	4.500.000
106	Audio Amplifier	Hibah	2018	1	5.500.000
107	Compact Disk Player	Hibah	2018	1	1.540.000
108	Unintemuptible Power Supply	Pembelian	2018	1	58.500.000
109	Lensa Kamera	Pembelian	2013	1	8.500.000
110	Amplifier	Pembelian	2015	1	6.000.000
111	Microphone	Pembelian	2015	1	500.000

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	
	Nama/ Jenis Barang			Banyak	Harga
I	2	3	4	5	6
112	Switcher/menara antenna	Pembelian	2016	3	9.750.000
113	Switcher/menara antenna	Pembelian	2016	15	48.750.000
114	Audio Processor	Hibah	2018	1	7.700.000
115	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	177.440.000
116	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	208.030.000
117	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	90.750.000
118	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	183.250.000
119	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	138.400.000
120	Jaringan Telepon di Atas Tanah	Pembelian	2010	1	5.000.000
	Total			327	4.798.802.033

2.2.2. Sumber Daya Aset

Aset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Aset Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
	Nama/ Jenis Barang				
I	2	3	4	5	6
1	Portable Generating Set	Pembelian	2017	1	Baik
2	Portable Generating Set	Hibah	2018	1	Baik
3	Station Wagon/Toyota Avanza	Pembelian	2010	1	Rusak Berat
4	Station Wagon/ Isuzu	Pembelian	2013	1	Rusak

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
	Nama/ Jenis Barang				
I	2	3	4	5	6
5	Sepeda Motor/ Honda WIN	Pembelian	2004	1	Rusak
6	Sepeda Motor Suzuki	Pembelian	2006	1	Rusak
7	Sepeda Motor Suzuki Thunder	Pembelian	2006	1	Rusak
8	Sepeda Motor Supra	Pembelian	2008	1	Rusak
9	Sepeda Motor Vario	Pembelian	2018	4	Baik
10	Global Positioning System	Pembelian	2014	1	Baik
11	Mesin Ketik	Pembelian	2018	1	Baik
12	Rak Besi/Metal	Pembelian	2016	1	Baik
13	Filling Besi/Metal	Hibah	2004	1	Baik
14	Filling Besi/Metal	Pembelian	2009	1	Baik
15	Filling Kayu	Pembelian	2011	1	Baik
16	Lemari Kayu	Pembelian	2018	5	Baik
17	Papan Visuil	Pembelian	2015	57	Baik
18	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	Baik
19	Papan Visuil	Pembelian	2017	1	Baik
20	Papan Nama Instansi	Pembelian	2017	1	Baik
21	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	Baik
22	Papan Pengumuman	Pembelian	2017	1	Baik
23	Papan Pengumuman	Pembelian	2018	1	Baik
24	Mesin Absensi	Pembelian	2017	1	Baik
25	Overhead Projektor/Infocus	Pembelian	2014	1	Baik
26	Overhead Projektor/View Sonic	Pembelian	2018	1	Baik
27	Overhead Projektor/Microvision	Hibah	2018	1	Baik

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
	Nama/ Jenis Barang				
I	2	3	4	5	6
28	Overhead Projektor/Nec M403HG	Hibah	2018	1	Baik
29	Rak Kayu	Pembelian	2008	1	Baik
30	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	2	Baik
31	Meja Kayu/Rotan	Pembelian	2017	7	Baik
32	Meja Kayu Rotan	Pembelian	2017	1	Baik
33	Kursi Lipat/Chitose	Pembelian	2009	6	Baik
34	Kursi Lipat	Pembelian	2013	5	Baik
35	Kursi Lipat Chitose	Pembelian	2018	50	Baik
36	Meja Biro	Pembelian	2009	3	Baik
37	Sofa/Kayu local	Pembelian	2009	1	Baik
38	Sofa	Pembelian	2018	2	Baik
39	Meublair Lainnya	Pembelian	2017	1	Baik
40	Mesin Potong Rumput	Pembelian	2018	1	Baik
41	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	Baik
42	AC Unit/Sharp	Pembelian	2017	1	Baik
43	AC Unit	Pembelian	2017	1	Baik
44	AC Unit	Pembelian	2017	1	Baik
45	AC Split	Pembelian	2009	1	Baik
46	AC Split	Pembelian	2016	2	Baik
47	AC Split/Jetcool	Pembelian	2017	1	Baik
48	Loudspeaker/Toa	Pembelian	2015	1	Baik
49	Loud Speaker/Proel EX-15P	Hibah	2018	4	Baik
50	Loudspaecker/Proel Calbe Connector	Hibah	2018	1	Baik
51	Sound System/Home	Pembelian	2018	1	Baik

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
	Nama/ Jenis Barang				
I	2	3	4	5	6
	Use				
52	Microphone/Ashley SMR-6	Hibah	2018	1	Baik
53	Microphone/Proel	Hibah	2018	1	Baik
54	Microphone Floor Stand	Hibah	2018	4	Baik
55	Tustel	Pembelian	2011	1	Baik
56	Tustel	Pembelian	2013	1	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2017	1	Baik
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2018	1	Baik
59	Internet	Pembelian	2018	1	Baik
60	P.C Unit/Acer	Pembelian	2014	1	Baik
61	P.C Unit/Asus	Pembelian	2018	2	Baik
62	P.C Unit/Lenovo	Pembelian	2018	1	Baik
63	Lap Top/Toshiba L40-AS101G Intel	Pembelian	2015	1	Baik
64	Laptop Toshiba	Pembelian	2015	1	Baik
65	Lap Top Asus	Pembelian	2016	2	Baik
66	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	Baik
67	Lap Top HP	Pembelian	2016	1	Baik
68	Lap Top Asus	Pembelian	2017	3	Baik
69	Lap Top Asus	Pembelian	2017	1	Baik
70	Hard Disk	Pembelian	2016	1	Baik
71	Hard Disk	Pembelian	2018	2	Baik
72	Printer Canon	Pembelian	2018	5	Baik
73	Printer Epson	Pembelian	2018	1	Baik

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
	Nama/ Jenis Barang				
I	2	3	4	5	6
74	Printer Epson LX 300	Pembelian	2018	1	Baik
75	Printer HP	Pembelian	2015	1	Baik
76	Printer Canon Pixma MP 237	Pembelian	2015	1	Baik
77	Printer Canon MP 237	Pembelian	2015	1	Baik
78	Printer LX 310	Pembelian	2015	1	Baik
79	Printer Canon Inkjet	Pembelian	2016	1	Baik
80	Printer Canon Pixma	Pembelian	2017	3	Baik
81	Peralatan Persomal Komputer	Pembelian	2016	1	Baik
82	Server HP	Pembelian	2016	1	Baik
83	Router	Pembelian	2014	1	Baik
84	Router	Pembelian	2015	10	Baik
85	Router	Pembelian	2016	3	Baik
86	Router	Pembelian	2016	3	Baik
87	Router	Pembelian	2016	10	Baik
88	Router	Pembelian	2016	1	Baik
89	Router	Pembelian	2016	1	Baik
90	Router	Pembelian	2016	1	Baik
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2012	2	Baik
92	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Pembelian	2010	1	Baik
93	Meja Kerja Pejabat Lai-lain	Pembelian	2010	1	Baik
94	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Pembelian	2007	6	Baik
95	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Pembelian	2009	6	Baik

No	Spesifikasi Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Banyaknya	Keadaan Barang
	Nama/ Jenis Barang				
I	2	3	4	5	6
	Telekomunikasi				
116	Bangunan Menara Telekomunikasi	Pembelian	2017	1	Baik
117	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	Baik
118	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	Baik
119	Jaringan Distribusi	Pembelian	2017	1	Baik
120	Jaringan Telepon di Atas Tanah	Pembelian	2010	1	Baik
Total				327	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi masalah komunikasi dan informatika. Adapun jenis pelayanan dasar tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2018	Realisasi	Target 2019	Realisasi	Target 2020	Realisasi
1	Meningkat Efektivitas Pelayanan Kantor	Persentase Efektivitas Pelayanan Kantor	100%	92,73%	100%	83,37 %	100%	92,5%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas laporan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%	99,50%	100%	99,50 %	100%	65,7%
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase Kesesuaian	100%	92,14%	100%	90,06 %	100%	74,5%

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2018	Realisasi	Target 2019	Realisasi	Target 2020	Realisasi
	Program Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen dengan RPJMD						
4	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data	100%	87,73%	100%	98,25 %	100%	88,3%
5	Meningkatnya Kualitas Aparatur pengaman Data	Persentase Aparatur Pengaman Data	100%	94,36%	100%	97,32 %	100%	91%
6	Meningkatnya Kelancaran Informasi Publik	Persentase Infrastruktur komunikasi	100%	93,39%	100%	71,26 %	100%	95,3%
7	Meningkatkan Infrastruktur Informatika	Persentase Infrastruktur Informatika	100%	99,71%	100%	63,81 %	100%	94,4%

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	(%)	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	(%)
1	Meningkat Efektivitas Pelayanan Kantor	Persentase Efektivitas Pelayanan Kantor	100	90,06	90,06	100	92,5	92,5
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas laporan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100	83,37	83,37	100	65,7	65,7
3	Meningkatnya Kualitas Program Organisasi Perangkat	Persentase Kesesuaian Dokumen dengan RPJMD	100	99,50	99,50	100	74,5	74,5

No	Sasaran	Indikator	Capaian					
			Target 2019 (%)	Realisasi 2019 (%)	(%)	Target 2020	Realisasi 2020 (%)	(%)
	Daerah							
4	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data	100	71,26	71,26	100	88,3	88,3
5	Meningkatnya Kualitas Aparatur pengaman Data	Persentase Aparatur Pengaman Data	100	63,81	63,81	100	91	91
6	Meningkatnya Kelancaran Informasi Publik	Persentase Infrastruktur komunikasi	100	98,25	98,25	100	95,3	95,3
7	Meningkatkan Infrastruktur Informatika	Persentase Infrastruktur Informatika	100	97,32	97,32	100	94,4	94,4

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat dan hasil telaahan terhadap RT RW, terdapat sinkronisasi antar dokumen perencanaan dari pusat hingga kabupaten / kota yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya Infrastruktur IT secara utuh dan menyeluruh untuk mendukung rencana pembangunan Daerah dalam pengembangan dan pengimplementasian Digitalisasi Kabupaten Sumbawa Barat
2. Belum terpenuhinya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa mendukung pengembangan dan pengimplementasian Digitalisasi Kabupaten Sumbawa Barat
3. Kebutuhan akan pusat data yang terpadu (Data Center) yang akan menunjang tujuan Digitalisasi Kabupaten Sumbawa Barat

4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi Informasi yang masih tergolong rendah dan sikap proaktif masyarakat terhadap teknologi informasi yang belum optimal
5. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten / Pusat terhadap perwujudan SPBE dan *Smart City*.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat masih mempunyai permasalahan antara lain :

1. Internal

- a) Masih kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh formasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak berbanding lurus dengan kebutuhan dinas.
- b) Belum tersedianya data dan informasi yang valid. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya data dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkup Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang kemudian dapat diolah menjadi informasi daerah.
- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini karena disebabkan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah baru, sehingga sarana dan prasaran yang dimiliki belum memadai.
- d) Masih terbatas kawasan hotspot internet publik
- e) Belum terpadunya pemanfaatan internet untuk pelayanan publik
- f) Belum terpadunya pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan publik
- g) Belum tersedianya data statistik sektoral daerah yang berkesinambungan
- h) Belum terpadunya penyusunan data statistik daerah

2. Eksternal

- a) Belum optimalnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam hal tatalaksana program dan kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat.
- b) Masih terbatasnya upaya desiminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional.
- c) Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi.
- d) Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi.
- e) Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah *“ Terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat Baik Berlandaskan Gotong Royong”*

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KSB Baik adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akheratnya serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
2. Gotong royong yang dalam bahasa tau tana samawa “basiru” merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektivitas inilah yang menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotong royong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang sesuai dengan misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas teknologi komunikasi dan informasi
2. Meningkatnya kualitas data dan informasi

Sasaran dari pada tujuan meningkatnya aksesibilitas teknologi dan informasi adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi secara merata,
2. Tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas,
3. Tersedianya lembaga penyedia layanan yang profesional, dan
4. Tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh

Sasaran dari pada tujuan meningkatnya kualitas data dan informasi adalah :

1. Tersedianya data statistik yang berkualitas
2. Terwujudnya efektivitas pengolahan data
3. Terwujudnya penyebaran dan kemudahan akses terhadap informasi data
4. Meningkatnya kemampuan aparatatur dalam mengolah data
5. Tersedianya informasi atas pelaksanaan kegiatan

Table 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika KSB Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

No	Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan	Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik yang Belum Optimal	Belum terintegrasinya sistem informasi masing-masing OPD	Iklim digitalisasi yang sedang menjadi Tren

3.3. Telaahan Renstra Kementrerian / Lembaga dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Renstra Kemenkominfo Republik Indonesia

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.”* Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.3.2 Telaahan Renstra Diskominfo Provinsi NTB

Adapun Visi dan Misi Pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagaimana gambar berikut ini adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”**.

Dalam Visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

1. Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional
2. Satu Komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan Visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP”:

Melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan serta Konektivitas Wilayah.

Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI”:

Melalui Transformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi.

Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS”:

Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah.

Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI”:

Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI”:

Melalui Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Pertanian, Pariwisata dan Industrilisasi.

Misi 6 “ NTB AMAN DAN BERKAH”:

Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional sehingga dapat dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa salah satu kebijakan penataan runag adalah pengembangan system prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata. Salah satu strategi Pengembangan Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata adalah mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri atas :

1. Pengembangan jaringan mikro digital perkotaan di Sekongkang ke masing-masing :Ai kangkung (13 km) dan Tatar (11 km), Seteluk-UPT tambak Sari sepanjang 7,5 km, Taliwang – Sampir sepanjang 4 km.
2. Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
3. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
4. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten;
5. Pemanfaatan secara bersama pada suatu tower BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama; dan
6. Pengembangan jaringan televisi dan radio ke seluruh pelosok pedesaan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar, baik pada sektor wisata, peternakan, pertanian maupun hasil laut. Namun seluruh potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terjadi karena belum memadainya infrastruktur pendukung dan masih rendahnya kualitas sebagian sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menjadi hambatan dan ancaman bagi kelangsungan pembangunan daerah. Sumber daya alam yang tersedia sudah seharusnya dikelola secara lebih professional sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Isu –isu Strategis Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

No	Bidang	Masalah	Issue
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Komunikasi dan Informatika	Belum meratanya sarana prasarana komunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat	Penyebaran informasi masih belum merata
2.	Statistik dan Persandian	Belum tersedianya data untuk informasi / khusus daerah	Ketersediaan data masih terbatas, pengamanan data masih belum maksimal
		Belum maksimalnya pengamanan data	
3.	Sekretariat	Pelayanan internet dinas belum tertib dan lancar	Pelayanan administrasi perkantoran masih belum tertib dan lancar

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terdapat didalam RPJMD 2021 - 2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat.

4.1.1 Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu OPD yang turut berperan dalam mendukung pencapaian misi 3 (Tiga) RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat. Tahun 2021 -2026 yaitu *“KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik”

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *Outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 - 2026 berdasarkan isu strategis yang adasebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
3. Meningkatnya kualitas data statistik dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sumbawa Barat

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Meningkat	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik
		Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	98	98	98	98	98	98
			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas data statistik dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Peresentase Data Statistik Sektoral dalam Dokumen Perencanaan Daerah	68.51	74.59	82.87	96.69	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada dasarnya tidak terlepas dari **Visi** dan **Misi** Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat “**Terwujudnya KSB Baik Berlandaskan Gotong Royong**”.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat disamping harus berlandaskan pada tugas pokok Dinas yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian hendaknya juga mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan guna tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat agar lebih efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat dalam 5 (lima) tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabaran pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya KSB Baik berlandaskan Gotong Royong ”

Misi 3 : KSB Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen rka-organisasi perangkat daerah dan perubahan rka-organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen penyusunan dpa-organisasi perangkat daerah dan perubahan dpa-organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja organisasi perangkat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			daerah
		Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan gaji dan tunjangan asn
			Meningkatkan kualitas dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen penatausahaan barang milik daerah pada organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
			Meningkatkan kualitas Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Meningkatkan kualitas Dokumen Administrasi Umum Perangkat	Meningkatkan kualitas dokumen penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Meningkatkan kualitas dokumen

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Daerah	penatausahaan arsip dinamis pada organisasi perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas Dokumen	Meningkatkan kualitas dokumen
		Pengadaan Barang Milik Daerah	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen
			pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
			Meningkatkan kualitas dokumen
			pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		Meningkatkan kualitas Penyediaan Jasa	Meningkatkan kualitas dokumen
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Meningkatkan kualitas dokumen
			penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen
			penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			Meningkatkan kualitas dokumen
			penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Meningkatkan kualitas dokumen
			pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Meningkatkan kualitas dokumen
			pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas dokumen pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pengelolaan media komunikasi public Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik Meningkatkan kualitas pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
	Meningkatnya kualitas data statistik dan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Meningkatkan kualitas Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas sdm pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik Meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Kabupaten/Kota	daerah kabupaten/kota
		Meningkatkan kualitas Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 – 2026, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp.3.846.890.407,-.Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program – program pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capai an Pada Awal Tahun Peren canaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan														Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi inerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Cukup	3,846,891	Cukup	40,000	Cukup	4,100,000	Cukup	4,250,000	Cukup	4,500,000	Baik	4,600,000	Baik	4,600,000	DISKOMINFO	KSB
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah			Realisasi Anggaran		98	4,201,000	98	4,156,000	98	4,111,000	98	4,116,000	98	4,121,000	98	4,126,000	98	4,126,000	DISKOMINFO	KSB

				Nilai SAKIP		B B		BB		BB		A		A		A		A		DISKOMINFO	KSB
			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH																	DISKOMINFO	KSB
																				DISKOMINFO	KSB
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		10 0	152,000	100	152,00 0	100	152,000	100	152,000	100	152,000	100	152,000	100	152,000	DISKOMINFO	KSB
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		6	100,000	6	100,00 0	6	100,000	6	100,000	6	100,000	6	100,000	6	100,000	DISKOMINFO	KSB

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	6,000	1	60,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun		1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monev Kinerja SKPD		3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	1,000	DISKOMINFO	KSB

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100	2,669,000	100	2,669,000	100	266,900	100	2,669,000	100	2,669,000	100	2,669	100	2,669	DISKOMINFO	KSB
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600	1	2,600	DISKOMINFO	KSB
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan SKPD		4	12,000	4	12,000	4	12,000	4	12,000	4	12,000	4	12,000	4	12,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan		12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	DISKOMINFO	KSB

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu		100	35,000	100	35,000	100	35,000	100	35,000	100	35,000	100	35,000	100	35,000	DISKOMINFO	KSB
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		4	35,000	4	35,000	4	35,000	4	35,000	4	35,000	4	35,000	4	35,000	DISKOMINFO	KSB
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	DISKOMINFO	KSB
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	DISKOMINFO	KSB
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis		5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	DISKOMINFO	KSB
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	DISKOMINFO	KSB

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	DISKOMINFO	KSB
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD		4	30,000	4	30,000	4	30,000	4	30,000	4	30,000	4	30,000	4	30,000	DISKOMINFO	KSB
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipenuhi		100	400,000	100	350,000	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	300,000	DISKOMINFO	KSB
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		4	200,000	3	150,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	DISKOMINFO	KSB
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan		5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	DISKOMINFO	KSB
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan		3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	3	100,000	DISKOMINFO	KSB

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan		100	615,000	100	615,000	100	615,000	100	615,000	100	615,000	100	615,000	DISKOMINFO	KSB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang disediakan		2	15,000	2	15,000	2	15,000	2	15,000	2	15,000	2	15,000	DISKOMINFO	KSB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor		35	600,000	35	600,000	35	600,000	35	600,000	35	600,000	35	600,000	DISKOMINFO	KSB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara		100	160,000	100	165,000	100	170,000	100	175,000	100	180,000	100	185,000	DISKOMINFO	KSB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Jabatan yang dipelihara		12	25,000	14	30,000	16	35,000	18	40,000	20	45,000	22	50,000,000	DISKOMINFO	KSB

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	1	5,000	1	5,000,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	DISKOMINFO	KSB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	DISKOMINFO	KSB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor yang dipelihara	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	DISKOMINFO	KSB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	4	10,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	DISKOMINFO	KSB
	Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik			Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik															DISKOMINFO	KSB

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi dan komunikasi Public		A	223,768	A	225,000	A	250,000.00	A	300,000	A	320,000.00	A	350,000	A	350,000	DISKOMINFO	KSB
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PPID OPD yang aktif		12	223,768	13	225,000	14	250,000	15	300,000	17	320,000	20	350,000	20	350,000	DISKOMINFO	KSB
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama Media dalam Rangka Penyebaran Informasi Publik		100	141,494	100	120,000.00	100	125,000	100	130,000	100	135,000	100	140,000	100	140,000	DISKOMINFO	KSB
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Hotspot Publik		10	50,000	12	55,000.00	15	60,000	17	6,500	18	67,000	20	70,000	20	70,000	DISKOMINFO	KSB
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi		10	82,274	12	100,000.00	14	150,000.00	16	160,000	18	200,000	20	250,000	20	250,000	DISKOMINFO	KSB

			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		100,00	562,324	100,00	6,000,561	100,00	638,563	100,00	657,919	100,00	713,211	100,00	77,454	100,00	77,454	DISKOMINFO	KSB
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang dikelola		68,51	562,324	74,59	6,000,561	82,87	638,563	96,69	657,919	100	713,211	100	77,454	100	774,532	DISKOMINFO	KSB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data set yang terkumpul, terkelola, teranalisis dan terdesiminasi		124	77,324	135	850,561	150	93,563	175	102,919	181	113,211	181	124,532	181	124,532	DISKOMINFO	KSB
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah OPD yang terotorisasi		15	77,324	20	200,000	33	200,000	33	20,000	33	200,000	33	200,000	33	200,000	DISKOMINFO	KSB

			Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Aparatur yang terlatih dibidang Statistik		34	120,000	34	120,000	34	120,000	33	100,000	33	100,000	33	100,000	33	100,000	DISKOMINFO	KSB
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Daerah (Indeks kami)		15	365,000	20	395,000	30	425,000	40	455,000	50	500,000	60	550,000	60	550,000	DISKOMINFO	KSB
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah dilakukan identifikasi keamanan Informasi		10	325,000	20	340,000	25	360,000	30	380,000	40	415,000	50	450,000	50	450,000	DISKOMINFO	KSB
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik pemerintahan daerah yang diaudit		3	250,000	3	275,000	3	300,000	3	325,000	3	350,000	3	375,000	3	375,000	DISKOMINFO	KSB

			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah ketersediaan Sumber daya keamanan informasi yang disediakan dan dikelola		2	150,000	2	200,000	2	225,000	2	250,000	2	300,000	2	325,000	2	325,000	DISKOMINFO	KSB
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase titik dalam pola hubungan komunikasi sandi yang teramanakan		36	40,000	40	55,000	53	65,000	67	75,000	80	85,000	93	10,000	93	100,000	DISKOMINFO	KSB
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah titik pola hubungan komunikasi sandi teramanakan		25	40,000	30	55,000	40	65,000	50	75,000	60	85,000	70	100,000	70	100,000	DISKOMINFO	KSB

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021- 2026 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel VII.1. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD dan sasaran RPJMD 2021- 2026 Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realisasi Anggaran		98	98	98	98	98	98	98
2	Nilai SAKIP		BB	BB	BB	A	A	A	A
3	Presentase OPD yang Menyelenggarakan Pelayanan Berbasis Elektronik		100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Data Statistik Sektoral dalam Dokumen Perencanaan Daerah		68.51	74.59	82.87	96.69	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026 ini berpedoman pada PRJMD Kabupaten Sumbawa Barat yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman penyusunan Renstra yang akan datang Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan. Dengan disusunnya rencana strategis tahun 2021-2026 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target, Sasaran dan dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus juga bisa mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumbawa Barat.